

## **PENGARUH PENGELUARAN KONSUMSI DAN INVESTASI PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

**Darma Rika Swaramarinda\***  
**Susi Indriani\***

### ***ABSTRACT***

*This research was aimed at describing connections between government expenditures to Indonesia's economic growth in the period 1997-2007. In this research, central government expenditure can be divided into current expenditure and capital expenditure. The data were taken from Badan Pusat Statistik, International Funding Statistik (IFS) and Asian Development Bank (ADB). The analysis use qualitative and quantitative. Qualitative analysis described in descriptive about government expenditures in Indonesia. The quantitative analysis used Ordinary Least Squares (OLS) with secondary data. The Regression of research results show that: (1) current expenditure has a positive relationship to economic growth and the effect statistically significant. (2) capital expenditure has a positive relationship to economic growth and the effect statistically significant.*

*Keywords: government expenditure, current expenditure, capital expenditure, economic growth*

### **PENDAHULUAN**

Berbagai\* kemajuan dan perkembangan pembangunan telah dicapai dan telah berhasil meningkatkan perekonomian Indonesia. Salah satu indikator keberhasilan tersebut terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11% per tahunnya pada periode penelitian. Angka rata-rata pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan Indonesia cukup tinggi. Hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat, pemerintah, para pelaku ekonomi, dan juga pihak luar negeri.

Selain tingkat pertumbuhan yang tinggi, pesatnya pembangunan ekonomi pun membawa dampak pada

meningkatnya standar hidup dan kesejahteraan masyarakat, dimana peningkatan standar hidup ini tidak hanya peningkatan pendapatan saja tetapi juga peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa publik baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Penyelenggaraan barang dan jasa publik ini secara langsung merupakan tanggung jawab utama pemerintah karena ciri utama dari barang dan jasa publik itu sendiri yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Dalam perekonomian modern bahwa penggunaan sumber daya tidak hanya untuk investasi dan konsumsi juga untuk penggunaan publik. Sebagai contoh di USA bahwa kurang lebih 20% dari total output lebih dibelanjakan oleh pemerintah untuk kepentingan publik tersebut, bahkan di

---

\* Darma Rika S & Susi Indriani. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

banyak negara angkanya bahkan lebih besar (Syafarudin, 2003).

Besarnya penyediaan fasilitas publik ini mempunyai korelasi terhadap besarnya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah suatu negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan pemerintah. Seperti telah diketahui, pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercermin dalam realisasi anggaran belanja rutin dan realisasi anggaran belanja pembangunan, sedangkan jumlah seluruh penerimaan meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang disebut penerimaan pembangunan. Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi (*current expenditure*), misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain. Sebaliknya terdapat elemen pengeluaran pembangunan yang sebagian besar merupakan pengeluaran untuk investasi (*capital expenditure*) dapat dikategorikan sebagai pengeluaran yang bersifat konsumsi, seperti berbagai jenis upah dan gaji tambahan. Dari kedua jenis pengeluaran tersebut, pengeluaran pembangunanlah yang memiliki sumbangan terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto nasional yang dilakukan pemerintah

pusat (Matriks Investasi Pemerintah BPS).

Pengeluaran pemerintah dalam hal ini pengeluaran investasi pemerintah memiliki kedudukan yang strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sering pula dikatakan bahwa pengeluaran investasi pemerintah dapat memainkan peran sebagai salah satu penggerak utama (*prime mover*) dalam perekonomian, sehingga ketika perekonomian sedang mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi yang memerosotkan kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian, pemerintah melalui instrumen kebijakan yang dimiliki dapat tampil menyelamatkan keadaan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah melalui anggaran belanja defisit, dan sebaliknya.

Dalam setiap sistem perekonomian, baik kapitalis atau sistem perekonomian sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang penting. Peranan pemerintah sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem kapitalis. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi :

1. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan

jalan, bendungan dan lain sebagainya.

Dalam penelitian Gwartney, Lawson dan Holcombe (1998), menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai fungsi sebagai *core function*. Fungsi ini dapat membuat peningkatan dalam efisiensi perekonomian dan seterusnya dapat meningkatkan pertumbuhan. Ada dua kategori dalam fungsi ini yang kebanyakan digunakan dalam berbagai penelitian, yaitu ; fungsi sebagai pelindung (*protective function*) dan fungsi sebagai penyedia barang-barang publik (*provision of a limited set of collective goods*). *Protective function* termasuk di dalamnya penegakan peraturan dan hukum dan hak-hak individu yang dapat melindungi masyarakat dari kehilangan hak-haknya. Fungsi yang kedua yaitu *provision of a limited set of collective goods*, adalah menyediakan barang-barang atau jasa seperti pertahanan, jalan, pendidikan dan layanan masyarakat lainnya serta barang-barang yang tidak disediakan atau disediakan dalam jumlah yang sedikit sekali oleh sektor swasta. Dengan tersedianya barang-barang seperti disebutkan diatas dan perlindungan hak kepemilikan dapat meningkatkan pertumbuhan PDB (Burda dan Wyplosz, 2001).

Pengeluaran pemerintah secara garis besar terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tercakup dalam pengeluaran rutin dan pengeluaran investasi pemerintah tercakup dalam pengeluaran pembangunan.

Di negara-negara berkembang pengeluaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan barang publik murni yang tidak dapat dihasilkan oleh pihak swasta seperti energi, pertahanan, dan juga untuk membiayai kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pembiayaannya dilaksanakan dengan prinsip kemampuan membayar (Syamsi:1994). Selain itu, hal ini pun berkaitan dengan meningkatnya defisit fiskal di negara berkembang, karena keterbatasan kemampuan negara dalam meningkatkan penerimaannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi.

Peranan dan besarnya pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah menjadi sesuatu yang mengundang kontroversi pada ekonomi makro. Sementara negara-negara bergerak menuju pasar terbuka dan bebas, pengeluaran konsumsi pemerintah telah meningkat secara terus-menerus.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya diartikan sebagai suatu proses dimana PDB riil atau pendapatan riil per kapita meningkat secara terus menerus melalui kenaikan produktivitas per kapita (Salvatore:1977).

Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan peningkatan output dan pendapatan riil perkapita memang bukanlah satu-satunya sasaran kebijaksanaan di negara-negara berkembang, namun kebijaksanaan ekonomi menaikkan

tingkat pertumbuhan output perlu dilakukan karena:

1. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu syarat yang sangat diperlukan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat.
2. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu prasyarat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya, seperti: peningkatan pendapatan dan kekayaan masyarakat, ataupun penyediaan fasilitas dan sarana sosial lainnya (Thirwall: 1976).

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian yang bersifat teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro:1994).

Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara maju, yaitu :

- a. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan penambahan penduduk yang tinggi.
- b. Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, khususnya produktivitas tenaga kerja.
- c. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.

- d. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
- e. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai pemasaran dan sumber bahan baku.
- f. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik, dengan mengasumsikan luas lahan tetap, maka yang mempengaruhi pertumbuhan adalah peningkatan pada penawaran tenaga kerja, peningkatan pada *capital stock* dan peningkatan pada produktivitas.

Meningkatnya penawaran tenaga kerja akan menyebabkan bertambahnya output. *Real output* meningkat bila semakin banyak orang yang ikut serta dalam proses produksi suatu negara. Peningkatan modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu ; peningkatan pada modal fisik dan modal tenaga kerja. Modal fisik meningkatkan output dikarenakan hal tersebut merangsang produktivitas tenaga kerja dan secara langsung menyediakan pelayanan yang berharga. Peningkatan pada produktivitas akan terjadi ketika investasi pada peralatan seperti komputer dan mesin yang dapat mengurangi jam kerja tenaga kerja.

Modal tenaga kerja meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena tenaga kerja yang mempunyai *skill* lebih produktif dibandingkan

dengan mereka yang tidak. Investasi pada modal tenaga kerja dapat dilakukan melalui pendidikan atau pelatihan. Peningkatan produktivitas menjelaskan peningkatan pada output yang tidak dapat dijelaskan oleh pertambahan input. Yang terpenting dari produktivitas adalah dengan adanya kemajuan teknologi, yang mempengaruhinya dengan 2 cara. Pertama adalah kemajuan pada pengetahuan yang disebut *inventions* dan kedua adalah penggunaan dari pengetahuan itu sendiri yang menyebabkan produksi yang lebih efisien yang disebut inovasi. (Burda dan Wyplosz, 2001)

Perkembangan perekonomian suatu Negara dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik bruto (PDB) Negara tersebut. PDB merupakan nilai dari total output yang dihasilkan oleh suatu Negara. Selama kurun waktu tersebut, PDB Indonesia terus meningkat sementara pertumbuhannya mengalami fluktuasi dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,12% per tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun walaupun secara umum dapat kita tarik kesimpulan bahwa pertumbuhannya cenderung membaik terutama setelah pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan ekonomi sehingga tercipta suasana perekonomian yang kondusif. Pada saat krisis ekonomi melanda Asia, Indonesia tidak terkecuali terkena dampaknya bahkan mungkin yang terparah, tetapi saat ini perekonomian Indonesia sudah mulai bangkit lagi.

## **Pengeluaran Pemerintah**

Dalam neraca anggaran pendapatan dan belanja negara, pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Klasifikasi ini mirip seperti klasifikasi pengeluaran ke dalam pos-pos pengeluaran lancar dan pos-pos pengeluaran kapital. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang); angsuran dan bunga utang pemerintah; serta sejumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.

Identitas keseimbangan pendapatan nasional  $Y=C+I+G+X-M$  merupakan "sumber legitimasi" pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari notasi yang sangat sederhana tersebut dapat ditelaah bahwa kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional (Dumairy:1997).

Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak

## **Investasi**

cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus pula diperhitungkan siapa (masyarakat lapisan mana) yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya.

WW Rostow dan RA Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, menurut mereka, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total-dengan perkataan lain juga rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Karena pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tahap besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri.

Data yang digunakan untuk menunjukkan perkembangan investasi pemerintah pada penelitian ini adalah data realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang

berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk merealisasikan sasaran-sasaran dari program pembangunan. Anggaran pembangunan dialokasikan terutama untuk membiayai proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat.

Pengeluaran pembangunanlah yang memiliki sumbangan terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto nasional yang dilakukan pemerintah pusat.

### **Pengeluaran Pemerintah**

Seperti telah diketahui, pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercermin dalam realisasi anggaran belanja rutin dan realisasi anggaran belanja pembangunan, sedangkan jumlah seluruh penerimaan meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang disebut penerimaan pembangunan. Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi (*current expenditure*), misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain.

Pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran rutin negara dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiun, tunjangan serta belanja barang-barang dalam negeri, dana

### **Konsumsi**

rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya yang berdampak konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian menaikkan fungsi konsumsi yang menyumbang kontribusi terhadap bruto nasional dan pertumbuhan ekonomi.

### **Kerangka pikir Konseptual**

Pertumbuhan ekonomi merupakan perluasan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa, yang diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam kerangka teori Keynesian, berbagai jenis pengeluaran publik ini memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengeluaran pemerintah yang tinggi dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dan investasi melalui angka pengganda (*multiplier effect*) permintaan agregat. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan output tergantung pada besarnya dan efektivitas angka pengganda pengeluaran tersebut.

Pendapat WW Rostow dan RA Musgrave dalam Buku Ekonomi Publik (Goeritno:1995) menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini disebabkan karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana. Pada tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan peranan investasi swasta pada tahap ini sudah semakin besar.

Teori pertumbuhan Neo-klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu segi penawaran. Teori ini pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pengembangan faktor-faktor produksi, yaitu penambahan modal dan produktivitas modal marginal, penambahan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja marginal, serta perkembangan teknologi (Todaro, 1990).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini terbatas pada pengujian sampai sejauh mana variabel pengeluaran investasi pemerintah dan pengeluaran konsumsi pemerintah mempengaruhi variabel tidak bebas, pertumbuhan ekonomi. Analisis dilakukan dengan menggunakan data tahunan selama 11 tahun, dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2007. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, *International Monetary Fund*, *Asian Development Bank*, dan *International Funding Statistik (IFS)*. Secara spesifik data yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Pertumbuhan ekonomi (Y)

Data pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah data pertumbuhan PDB riil atas dasar harga konstan tahun 1990. Sumber datanya diperoleh dari

*International Funding Statistik (IFS).*

2. Pengeluaran konsumsi pemerintah (Gc)

Data pengeluaran rutin pemerintah digunakan sebagai proksi dari konsumsi pemerintah. Data ini dijadikan sebagai rasio dari PDB. Dalam penelitian ini tidak dilakukan pemisahan antara pengeluaran rutin yang merupakan pengeluaran konsumsi dan pengeluaran rutin yang merupakan pengeluaran investasi. Sumber datanya diperoleh dari BPS dan *Asian Development Bank (ADB).*

3. Pengeluaran investasi pemerintah (Gi)

Data pengeluaran pembangunan pemerintah digunakan sebagai proksi dari investasi pemerintah. Data ini dijadikan sebagai rasio dari PDB. Dalam penelitian ini tidak dilakukan pemisahan antara pengeluaran pembangunan yang merupakan pengeluaran konsumsi dan pengeluaran pembangunan yang merupakan pengeluaran investasi. Sumber datanya diperoleh dari BPS dan *Asian Development Bank (ADB).*

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif terhadap data *time series* dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif-kualitatif disusun berdasarkan metode penelitian dengan pengujian terhadap data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber data, jurnal, artikel, buku, majalah, internet dan studi literatur ilmiah yang

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan untuk analisis kuantitatif digunakan alat bantu ekonometrika untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

### **Spesifikasi Model Ekonometrik**

Model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari model yang dikembangkan oleh Peter Sjoberg (2003). Model ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengeluaran pemerintah dan variabel-variabel ekonomi lainnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Model ekonometrik penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Gc_t + \beta_2 Gi_t + \varepsilon_t$$

dimana :

$Y_t$  = pertumbuhan ekonomi pada tahun t

$Gc_t$  = rasio konsumsi pemerintah terhadap PDB pada tahun t

$Gi_t$  = rasio investasi pemerintah terhadap PDB pada tahun t

$\varepsilon_t$  = *error terms*

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Interpretasi Model**

Pada bagian ini akan diungkapkan pengaruh pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk pengolahan data, alat bantu yang digunakan adalah *software* Eviews 4.1.

Berdasarkan hasil pengolahan data, didapat persamaan regresi ganda sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Gc_t + \beta_2 Gi_t + \varepsilon_t$$

$$Y_t = 77379.66 + 6.031608 G_{ct} + 4.743162 G_{it} + E$$

(0.868144) (5.455496) (4.845605)

Berikut ini adalah nilai-nilai hasil uji statistik lainnya, yaitu :

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| R-squared             | 0.967779  |
| Adjusted R-squared    | 0.959724  |
| S.E. of regression    | 136526.1  |
| Sum squared resid     | 1.49E+11  |
| Log likelihood        | -143.9238 |
| Durbin-Watson stat    | 3.112801  |
| Mean dependent var    | 1209026.  |
| S.D. dependent var    | 680287.0  |
| Akaike info criterion | 26.71342  |
| Schwarz criterion     | 26.82194  |
| F-statistic           | 120.1431  |
| Prob(F-statistic)     | 0.000001  |

Dari uji F-statistik yang signifikan sampai dengan tingkat kepercayaan 0.00000 dan nilai Adj.R<sup>2</sup> yang sebesar 95.97 % dapat dinyatakan bahwa persamaan model yang terbentuk baik. Adapun kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran investasi pemerintah yang bertanda positif akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menguat. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan baik oleh pergerakan variabel-variabel bebasnya.

Nilai Durbin Watson (DW) dari persamaan adalah 3.112801. Sementara itu, untuk nilai n = 11 dan k = 3. Dari hasil test ini P-value = 0.066194 > 0.05 maka terima H<sub>0</sub>. Dengan tingkat keyakinan 95 % dapat disimpulkan bahwa tidak ada otokorelasi antar variabel.

Hasil uji White Heterocedasticity Test menghasilkan nilai sebagai berikut :

Obs\*R-squared : 9.116422  
Probability : 0.104510

Hasil uji tersebut dengan P-Value sama dengan 0.104510 menunjukkan bahwa H<sub>0</sub> yang menyatakan tidak ada heteroskedastisitas (homoskedastisitas) pada residual diterima pada tingkat signifikansi 5 %. Jadi, dengan tingkat keyakinan 95 % pada data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Nilai Durbin Watson yang dihasilkan sebesar 3.112801 sedangkan nilai adj. R<sup>2</sup>-nya sebesar 0.959724. Jadi, nilai Durbin Watson lebih besar dari nilai R<sup>2</sup>-nya sehingga tidak mengindikasikan adanya regresi lancung sebagai akibat non-stasionaritas variabel-variabel. Adj.R<sup>2</sup> > dW, merupakan indikasi adanya regresi lancung / *spurious regression*. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel tak bebas.

Distribusi residual yang dihasilkan menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi. Hal ini terlihat dari metode histogram dan Jarque-Berra yang digunakan, dimana nilai-P yang diperoleh cukup tinggi. H<sub>0</sub> : *error term* terdistribusi normal, dan

$H_1$  : *error term* tidak terdistribusi normal. Nilai-P sebesar 0,903543 lebih besar dari  $\alpha = 5 \%$ , P-value = 0,903543 > 0.05 maka terima  $H_0$ . dengan tingkat keyakinan 95 % maka dapat dikatakan *error term* terdistribusi normal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada teori-teori dan pembuktian baik secara empiris maupun ekonomi mengenai hubungan antara pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa Pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran investasi pemerintah di Indonesia mempunyai kecenderungan untuk meningkat setiap tahunnya. Terdapat hubungan yang positif pengeluaran konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi pada periode penelitian. Hal ini dikarenakan pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran rutin negara dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiun, tunjangan serta belanja barang-barang dalam negeri, dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya yang berdampak konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian menaikkan fungsi konsumsi yang menyumbang kontribusi terhadap bruto nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran investasi pemerintah mempunyai dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena pengeluaran investasi pemerintah dimaksudkan guna menunjang pertumbuhan

ekonomi dan mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Dan anggaran pembangunan dialokasikan terutama untuk membiayai proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Indikator Ekonomi*, berbagai edisi.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik dalam 50 Tahun Indonesia Merdeka*.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia*, berbagai edisi.
- Badan Pusat Statistik. *Matriks Investasi pemerintah*, Tahun 1996/1997-1998/1999.
- Bank Indonesia. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*, berbagai edisi.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga..
- Goeritno Mangkoesobroto. *Ekonomi Publik, Edisi III*. Yogyakarta :BPFE, 1995.
- Gujarati, Damodar. 2003. N. *Basic Econometrics. Fourth Edition*. McGraw-Hill Higher Education,
- Ibnu Syamsi S.U. 1994. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta : Rineka Cipta,
- Ram,R.. 1986. *Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross-Sectional and Time-Series Data*, American Economic Review, 76, 191-202,
- Ram,R., 1989. *Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross-Sectional and Time-*

- Series Data: A Reply*, American Economic Review, 79, 281-84,  
Salvatore, D & Dowling, E. T. 1977. *Theory and Problems at Economic Development*, Mc-Graw Hill, New York,  
Sjoberg, P. 2003. *Government Expenditures Effect on Economic Growth*. Lulea University of Technology,  
Syafaruddin, 2003. *Intisari Buku "Advanced Macroeconomics (David Romer)*, Tugas Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung,  
Thirwall A.P., *Finance Economic Development*, London Mc Millan Press Ltd , 1976.  
Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi : Edisi Kelima*. Bumi Aksara, 1994.  
\_\_\_\_\_. 1990. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga,  
Wyplosz .C, and Burda .M. 2001. *Macroeconomics: A European Text, 3rd edition*,